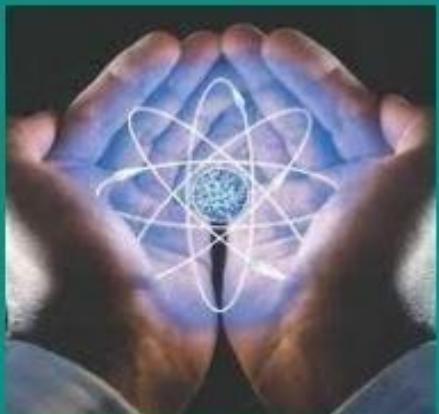


Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark).....	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title.....	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	6

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

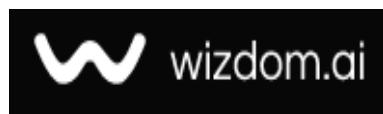
How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Political Dynasties Undermine Democratic Governance and Constitutional Integrity in Indonesia: Dinasti Politik Melemahkan Tata Kelola Demokratis dan Integritas Konstitusional di Indonesia

Mutia Husnah, muthiahusna9@gmail.com, (1)

Program Pascasarjana Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Haidir Fitra Siagian, hfitra.siagian@uin-aluddin.ac.id, ()

Program Pascasarjana Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Anggriani Alamsyah, nanialamsyah@gmail.com, ()

Program Pascasarjana Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Arifuddin Arifuddin, arifuddin.tike@uin-alauddin.ac.id, ()

Program Pascasarjana Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Kamaluddin Tajibu, kamaluddin.tajibu@uin-alauddin.ac.id, ()

Program Pascasarjana Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

General Background Local elections in Indonesia frequently trigger polarization, damaged social relations, and prolonged distrust within communities. Specific Background In Tallung Ura Village, Enrekang Regency, the 2024 election created social fragmentation, emotional tension, and disrupted daily interactions among residents. Knowledge Gap Limited research addresses reconciliation models that apply communication strategies integrating religious values and local cultural wisdom in rural settings. Aims This study analyzes the roles of communicators, communication mechanisms, and strategies that support post-election reconciliation. Using a qualitative case study, data were obtained through observation, interviews, and documentation with religious leaders, village authorities, and community actors. Results reveal that local communicators acted as mediators delivering persuasive, empathetic messages; open dialogue and personal mediation reduced tensions; and strategies grounded in Islamic teachings and cultural values such as sipakatau, sipakalebbi, and sipakainge rebuilt trust and social cohesion. Novelty lies in presenting a reconciliatory communication model based on spiritual guidance, cultural identity, and participatory mechanisms unique to Tallung Ura and rarely examined in political reconciliation literature. Implications indicate that strengthening mediator capacity and establishing communication forums may provide a transferable framework for restoring grassroots harmony and preventing recurring conflict in similar post-election contexts.

Highlights:

- Mediators used persuasive and empathetic communication to reduce tensions.
- Religious principles and cultural values supported sustainable reconciliation.
- Structured dialogue forums restored trust and rebuilt social cohesion.

Keywords: Post-Election Communication; Reconciliation Strategy; Local Mediators; Cultural Values; Social Cohesion

Published date: 2026-01-09

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah merupakan proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya, pemilihan sering kali memunculkan ketegangan sosial bahkan konflik terutama di tingkat lokal. Persaingan politik yang ketat, perbedaan pilihan serta adanya kepentingan tertentu dapat menyebabkan polarisasi di tengah masyarakat. Komunikasi politik sebagai salah satu bidang kajian komunikasi, selalu menjadi fenomena yang senantiasa aktual untuk didiskusikan terlebih di tahun politik seperti sekarang. Dewasa ini, politik menjadi hal yang ramai dibicarakan bahkan tidak hanya oleh para politisi, akademisi maupun pengamat tetapi kini telah merambah kepada masyarakat umum yang awam politik. Keberadaan komunikasi politik sudah ada sejak manusia berpolitik dan berkomunikasi [1].

Perkembangan Pilkada secara langsung menarik dalam sejarah perpolitikan lokal di negeri ini. Pilkada menjadi momentum peletakan dasar bagi fondasi kedaulatan rakyat dan sistem politik serta demokrasi di aras lokal. Fenomena menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat dalam mengapresiasi proses Pilkada secara langsung, hal ini bisa dimaknai sebagai operasionalisasi otonomi masyarakat untuk menentukan sendiri dan langsung kepala daerahnya, terlepas dari paksaan maupun politik mobilitas [2].

Sejak Indonesia memasuki era reformasi tahun 1998 sistem politik demokrasi di Indonesia telah berkembang demikian pesat. Perkembangan demokrasi ini ditandai dengan pelaksanaan sistem pemilihan umum langsung, baik Pemilu presiden maupun Pemilu kepala daerah. Banyak pihak berharap bahwa pemilihan secara langsung bisa membawa perubahan besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Biaya Pemilu langsung terlalu besar dan tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memprihatinkan. Konflik ini tidak hanya berlangsung saat menjelang pelaksanaan Pemilu tetapi juga setelah Pemilu [3].

Situasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi elektoral belum sepenuhnya dibarengi dengan kedewasaan politik di tingkat akar rumput. Perbedaan pilihan politik yang seharusnya menjadi hal yang lumrah dalam sistem demokrasi, justru sering kali memicu polarisasi dan konflik sosial yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat [4]. Dinamika ini dapat mengganggu harmoni sosial, memecah hubungan antarwarga dan bahkan menimbulkan ketegangan dalam lingkup keluarga maupun masyarakat setempat.

Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius terkait penyelenggaraan pemilihan umum. Salah satu catatan kelam dalam sejarah Pemilu terjadi pada tahun 2019, polarisasi politik yang terjadi di tingkat akar rumput turut memicu ketegangan sosial, bahkan berujung pada kerusuhan massa yang memprotes hasil pemilihan. Data Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada mencatat 505 konflik disertai kekerasan di Papua sejak Januari 2010 hingga 31 Oktober 2023, menunjukkan tingginya kerentanan konflik dalam konteks politik elektoral. Menghadapi Pemilu 2024, potensi polarisasi dan perpecahan di tingkat masyarakat perlu diwaspadai karena dapat memicu eskalasi konflik baru.

Berdasarkan laporan dari berbagai media lokal diketahui bahwa pasca pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Enrekang terjadi beberapa insiden fisik dan ketegangan antarpendukung di sejumlah lokasi. Salah satu peristiwa yang mendapat perhatian luas dari masyarakat ialah bentrokan antarwarga yang terjadi pada 27 November 2024, yang kemudian tersebar secara luas melalui rekaman video di media sosial.

Konflik merupakan salah satu masalah yang dapat mengganggu stabilitas sosial politik dan menghambat kemajuan pembangunan bangsa. Konflik yang terjadi di masyarakat perlu mendapat perhatian tersendiri baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat. Untuk itu, dalam mengatasi sebuah konflik baik pemerintah maupun warga masyarakat harus aktif merespon dan mengatasinya untuk mencapai kepentingan publik. Penanganan konflik oleh pemerintah dan keterlibatan warga secara aktif dalam memecahkan masalah sangat diperlukan untuk mencapai perdamaian [6]. Konflik yang muncul pasca pemilihan tidak hanya berdampak pada stabilitas sosial, tetapi juga memperlambat proses pembangunan di tingkat lokal. Pemerintah desa menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat yang terbelah akibat perbedaan politik.

Fenomena menarik, di tengah masyarakat dunia khususnya bangsa Indonesia yaitu menguatnya tuntutan akan demokrasi. Demokrasi dipandang lebih efektif, rasional dan praktis untuk meningkatkan martabat manusia maupun menghindari munculnya pemerintahan yang kuat, memaksa serta otoriter. Seorang pemimpin politik yang memiliki keterampilan, kepribadian, keyakinan dan tindakan yang unik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan baru di era demokrasi [7].

Melihat berbagai konflik yang muncul di sejumlah daerah pasca Pilkada serentak 2024 termasuk kericuhan antarpendukung, polarisasi akibat media sosial serta kekerasan di tingkat lokal. Upaya rekonsiliasi menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Rekonsiliasi tidak hanya berperan sebagai solusi jangka pendek untuk meredam ketegangan, tetapi juga sebagai pendekatan jangka panjang dalam membangun kembali kohesi sosial yang terfragmentasi akibat proses politik yang kompetitif. Rekonsiliasi menjadi jalan strategis untuk memulihkan hubungan antarwarga, mengembalikan rasa kepercayaan terhadap institusi dan memperkuat semangat kebersamaan.

Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik, tetapi juga menjadi cermin dinamika sosial dan politik masyarakat di tingkat lokal. Namun, di balik semangat demokrasi yang diusung Pilkada kerap menyisakan persoalan pasca pemungutan suara. Salah satu persoalan yang kerap mencuat adalah terjadinya konflik antarpendukung, ketegangan sosial, bahkan perpecahan di tingkat keluarga maupun komunitas lokal. Konflik semacam ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait, baik dari aspek politik, sosial, ekonomi maupun budaya [9]. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai konteks yang melatarbelakangi terjadinya konflik pasca Pilkada di Desa Tallung Ura Kabupaten Enrekang tahun 2024, guna memahami akar persoalan sekaligus mencari solusi yang konstruktif bagi penguatan demokrasi.

Rekonsiliasi menjadi langkah penting untuk memulihkan hubungan sosial yang retak akibat perbedaan politik. Rekonsiliasi merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik, baik individu maupun antar komunitas yang luas. Proses rekonsiliasi tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri konflik secara formal, tetapi juga membangun kembali kepercayaan dan harmoni di antara warga desa. Oleh karena itu, memahami strategi dan mekanisme rekonsiliasi yang diterapkan di Desa Tallung Ura Kabupaten Enrekang pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam.

Menurut M. Rawa El Amady, rekonsiliasi adalah proses transformasi dari yang sebelumnya berkonflik menjadi berdamai. Rekonsiliasi menjadi salah satu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan memulihkan kembali suatu hubungan dari kondisi buruk ke keadaan damai. Upaya rekonsiliasi dilakukan jika puncak perselisihan telah terlewati. Tahapan ini ditempuh sebagai pemulihhan pasca konflik berlangsung. Meski demikian, rekonsiliasi tetap termasuk salah satu tindakan penting dari rangkaian upaya penyelesaian konflik.

Rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 tidak cukup hanya dengan seruan damai formal, tetapi memerlukan pendekatan yang menyentuh aspek emosional dan nilai-nilai budaya masyarakat serta komunikasi apa yang dapat diterapkan pada masyarakat pasca Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Pendekatan komunikasi dapat berperan signifikan dalam hal ini, karena memiliki kekuatan moral dan spiritual untuk mengajak masyarakat kembali kepada prinsip-prinsip kebersamaan, toleransi dan saling menghargai. Nilai-nilai keislaman seperti ukhuwah Islamiyah, musyawarah dan islah (perdamaian) menjadi dasar yang kuat dalam membangun kembali jalinan sosial yang sempat retak.

Upaya rekonsiliasi pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024, berbagai pihak memiliki peran penting dalam menciptakan kembali kerukunan di masyarakat. Tokoh agama, pemerintah desa, tokoh masyarakat hingga masyarakat setempat memiliki peran vital dalam mengurangi polarisasi politik. Para tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk sikap dan pandangan masyarakat. Selain itu, mereka juga dapat menanamkan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya persatuan, perdamaian dan saling menghargai perbedaan.

Proses rekonsiliasi ini tidak selalu berjalan mulus, karena di dalamnya terdapat sejumlah hambatan yang patut menjadi perhatian. Baik dari segi komunikasi antar pihak, perbedaan kepentingan politik maupun minimnya pemahaman akan pentingnya perdamaian dan persatuan pasca konflik. Salah satunya yaitu faktor emosional, seperti rasa kekecewaan atau ketidakpercayaan antar kelompok yang terpecah akibat Pilkada seringkali menjadi penghalang besar bagi tercapainya rekonsiliasi. Selain itu, keberadaan kelompok-kelompok yang masih terjebak dalam fanatisme politik dapat memperlambat upaya perdamaian. Oleh karena itu, komunikasi dakwah yang efektif dapat menyentuh hati dan membangun kedekatan emosional antara individu yang terlibat konflik sangat dibutuhkan [10].

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan komunikasi yang lebih baik dalam proses rekonsiliasi. Terutama dalam konteks politik, di mana pemilihan kepala daerah tidak hanya mempengaruhi hasil Pilkada, tetapi juga hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Sebuah strategi komunikasi yang dapat mengatasi polarisasi politik akan memperkuat stabilitas sosial, yang pada akhirnya mendukung terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan bersatu.

Penelitian ini memiliki kekhasan karena secara khusus menyoroti rekonsiliasi pasca Pilkada 2024 di Desa Tallung Ura dengan memadukan analisis peran tokoh lokal, mekanisme komunikasi, serta nilai budaya lokal Enrekang seperti sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge. Pendekatan ini belum banyak dikaji dalam penelitian rekonsiliasi politik sebelumnya yang umumnya berfokus pada konflik nasional atau daerah berskala besar. Penelitian ini juga menawarkan model komunikasi rekonsiliatif berbasis kearifan lokal sebagai kontribusi teoretis sekaligus rekomendasi praktis bagi konteks politik lokal.

Keberhasilan rekonsiliasi pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Peran para tokoh agama, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat sangat penting dalam membentuk opini publik yang positif serta mendorong komunikasi yang konstruktif. Penelitian ini, akan menyoroti bagaimana elemen-elemen tersebut berkontribusi dalam membangun kembali hubungan sosial yang harmonis pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 di Desa Tallung Ura Kabupaten Enrekang.

Metode

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam komunikasi yang digunakan dalam proses rekonsiliasi sosial pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Desa Tallung Ura Kabupaten Enrekang. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap makna, pemahaman serta pengalaman subjektif dari para aktor yang terlibat dalam proses rekonsiliasi [11]. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap satu lokasi dan satu peristiwa yang spesifik [12], yakni pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Enrekang, yakni dinamika sosial masyarakat pasca pemilihan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tallung Ura, yang terletak di Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rekonsiliasi sosial pasca Pilkada di Desa Tallung Ura tahun 2024 sangat penting untuk diwujudkan dan dipertahankan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam komunikasi yang diterapkan dalam proses rekonsiliasi pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Desa Tallung Ura Kabupaten Enrekang. Pendekatan kualitatif dianggap relevan untuk menelaah fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual yang sulit disampaikan dengan metode kuantitatif [13].

C. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data tersebut bersumber dari hasil wawancara langsung dari informan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti [14]. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari tokoh agama, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat yang berada di Desa Tallung Ura Kabupaten Enrekang. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang lumrah digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi secara langsung dan terstruktur terhadap dinamika kerukunan sosial pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada), dengan menitikberatkan perhatian pada peran para tokoh masyarakat Desa Tallung Ura Kabupaten Enrekang. Fokus pengamatan diarahkan pada proses rekonsiliasi yang terjadi di tengah warga setelah kontestasi politik, khususnya dalam melihat bagaimana masyarakat di desa tersebut membangun kembali harmoni sosial sebagai objek kajian utama.

2. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang diteliti. Asep Saeful Muhtadi dan Maman Abd. Djaliel mengatakan bahwa wawancara adalah seni menanyakan sesuatu dengan alat pertanyaan yang benar (*the art of asking the right question*). Bagaimana merumuskan untuk percakapan dua pihak, antara orang yang mewawancarai dan orang yang diwawancarai untuk pengumpulan data yang diperlukan [15].

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, daftar statistik serta hal-hal yang terkait dengan penelitian [16]. Pada rancangan penelitian

yang akan dilakukan, dokumentasi digunakan untuk memahami dan mendalami kondisi sosial masyarakat Islam secara historis, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan pada saat rekonsiliasi di masyarakat Desa Tallung Ura.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sebagaimana lazim dalam pendekatan kualitatif. Peneliti berperan secara aktif dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data di lapangan. Keberadaan peneliti sebagai instrumen memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi secara mendalam dan memahami konteks sosial yang sedang diteliti. Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara semi terstruktur, lembar observasi dan catatan lapangan.

Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian yang berkaitan dengan dinamika konflik Pasca Pilkada dan proses rekonsiliasi, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti peran tokoh agama, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat dalam upaya perdamaian sosial. Melalui kombinasi antara keterlibatan langsung peneliti dan penggunaan instrumen pendukung, diharapkan data yang diperoleh bersifat mendalam, akurat dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat Desa Tallung Ura Kabupaten Enrekang.

F. Teknik Pengolaha dan Analisis Data

Proses pengolahan dan analisis data, ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Menurut Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh [17]. Tiga langkah utama dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan [18]. Proses ini dilakukan untuk mengorganisasi data secara sistematis agar peneliti dapat menemukan pola, tema atau kategori yang relevan dengan fokus penelitian. Reduksi data tidak hanya terjadi pada tahap awal, tetapi berlangsung secara berkesinambungan selama seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data, analisis sementara, hingga penyusunan kesimpulan akhir.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap penting dalam analisis kualitatif, yaitu proses menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terorganisasi dan mudah dipahami. Informasi tersebut dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk, seperti narasi deskriptif, matriks, tabel, grafik, jaringan (network) atau

bagan. Tujuan utama dari penyajian data adalah membantu peneliti melihat pola, hubungan antar kategori serta kecenderungan tertentu yang muncul dari data lapangan [17]. Peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi secara lebih komprehensif dan objektif.

Tahap ini juga memungkinkan peneliti merencanakan langkah analisis selanjutnya, termasuk melakukan verifikasi, memperdalam interpretasi, atau mengidentifikasi aspek-aspek baru yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data yang baik akan meningkatkan ketajaman analisis dan mempermudah proses penarikan kesimpulan akhir yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel [17].

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif memiliki istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan confirmability (objektivitas).

1. Uji Kredibilitas

Pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check.

2. Pengujian Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan seberapa tepat hasil penelitian dapat diterapkan kepada populasi tempat sampel penelitian diperoleh. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi yang lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung kepada pemakai.

3. Pengujian Dependability

Dependability disebut juga dengan reliabilitas. Penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability

ditempuh dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing.

4. Pengujian Confirmability

Pengujian confirmability dalam penelitian kualitatif disebut juga objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Hasil penelitian berfungsi sebagai proses penelitian yang dilakukan, berarti dapat dikatakan bahwa penelitian itu telah memenuhi ukuran uji confirmability. Dalam suatu penelitian, uji confirmability dilakukan oleh peneliti dengan mengonfirmasikan hasil penelitian kepada beberapa pihak di antaranya yang terkait dengan tujuan penelitian [19].

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Komunikator dalam Memfasilitasi Rekonsiliasi Pasca Pilkada

Peran komunikator menjadi faktor sentral dalam upaya memulihkan hubungan sosial masyarakat pasca pelaksanaan Pilkada di Desa Tallung Ura. Komunikator tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan tetapi juga sebagai mediator yang berperan dalam membangun jembatan komunikasi antara pihak-pihak yang berbeda pandangan politik. Komunikator, baik dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun pemerintah desa memiliki tanggung jawab moral untuk menumbuhkan kesadaran bersama bahwa perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Peran ini penting dalam membangun komunikasi persuasif dan partisipatif yang mendorong terciptanya rekonsiliasi sosial serta memperkuat kohesi masyarakat pasca Pilkada.

1. Tokoh Agama sebagai Mediator dan Komunikator Dakwah

Berdasarkan keterangan Ruslan, selaku tokoh agama di Desa Tallung Ura.

“Kami, sebagai bagian dari masyarakat baik tokoh agama, pemerintah desa, maupun warga setempat memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan desa yang aman dan tenteram. Terlebih saat ini, kita dapat melihat kondisi desa yang kurang harmonis. Oleh karena itu, kami selaku tokoh agama senantiasa memberikan arahan melalui mimbar-mimbar khutbah maupun dalam kegiatan pengajian. Kami tidak bermaksud menggurui, namun melihat fenomena yang terjadi saat ini, perlu adanya pihak yang berperan sebagai penengah untuk membantu meredakan konflik yang muncul pasca Pilkada. Kami selaku tokoh agama sering kali menjadi pihak pertama yang dipercaya oleh warga untuk menyampaikan keluhan dan keresahan mereka. Melalui ceramah, pengajian, maupun kunjungan rumah, ia berusaha menghadirkan pesan damai secara

persuasif dan tidak menghakimi. Pendekatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa konflik politik bersifat sementara, sedangkan hubungan sosial dalam masyarakat harus dipertahankan.”



Figure 1. Pengajian Bulanan Dusun Mendeng

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat, khususnya pasca penyelenggaraan Pilkada. Sebagai figur yang dihormati dan memiliki pengaruh moral, tokoh agama berfungsi sebagai mediator dan komunikator dakwah yang berupaya menenangkan suasana serta mengarahkan masyarakat menuju perdamaian dan persatuan.

Setelah pelaksanaan Pilkada, masyarakat di Desa Tallung Ura mengalami ketegangan akibat perbedaan pilihan politik. Sehingga dalam kondisi tersebut, tokoh agama mengambil peran strategis sebagai fasilitator rekonsiliasi sosial. Peran mereka tidak hanya terbatas pada penyampaian nilai-nilai keagamaan, tetapi juga meliputi upaya membangun komunikasi persuasif yang mampu menenangkan konflik dan memperkuat solidaritas komunitas. Tokoh agama menyusun pesan-pesan dakwah dengan memperhatikan sensitivitas sosial masyarakat serta memilih metode yang bersifat partisipatif agar warga merasa dilibatkan dalam proses pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini menjadi dasar bagi strategi komunikasi yang diterapkan dalam memulihkan keharmonisan pasca Pilkada, sebagaimana dijelaskan oleh Rahman selaku tokoh agama:

“Sebagai tokoh agama, kami berupaya menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah, saling menghormati, dan menghindari perpecahan, terutama setelah masa Pilkada. Melalui mimbar khutbah dan kegiatan pengajian, kami selalu mengingatkan jamaah agar tidak memperpanjang perbedaan pilihan politik, karena yang lebih utama adalah menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat. Dalam menyampaikan

dakwah, kami tidak menggunakan cara yang menggurui, melainkan dengan pendekatan yang persuasif dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun keharmonisan. Dengan cara seperti ini, pesan keagamaan lebih mudah diterima dan dipahami, karena disampaikan dengan bahasa yang lembut dan menyentuh hati. Alhamdulillah, masyarakat menunjukkan respon yang positif dan perlahan suasana di desa menjadi lebih kondusif, rukun serta saling menghargai antarwarga meskipun sebelumnya berbeda pandangan politik.”

Melalui mimbar khutbah dan kegiatan pengajian, tokoh agama menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang menekankan pentingnya ukhuwah, saling menghormati dan menghindari perpecahan. Pendekatan ini mencerminkan bentuk komunikasi persuasif dan partisipatif, di mana pesan keagamaan disampaikan dengan cara yang tidak menggurui, tetapi mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun keharmonisan.

“Dengan adanya proses rekonsiliasi ini, kami berharap seluruh masyarakat Desa Tallung Ura dapat kembali hidup rukun tanpa perpecahan akibat perbedaan pilihan politik. Kegiatan rekonsiliasi ini menjadi sarana untuk memulihkan hubungan sosial yang sempat renggang dan kembali membangun komunikasi yang lebih positif di antara warga. Interaksi yang dilakukan dalam proses ini merupakan bagian dari komunikasi yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama demi terciptanya keharmonisan sosial. Apabila rekonsiliasi tidak dilaksanakan, dikhawatirkan masyarakat akan sulit menemukan titik terang dalam menyelesaikan perbedaan yang ada. Oleh karena itu, sebagai mediator, saya berkomitmen untuk terus memfasilitasi kegiatan ini melalui penyuluhan rutin setiap bulan agar konflik serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.”

Kutipan Ruslan dan Rahman menunjukkan bagaimana tokoh agama menjalankan fungsi koordinasi makna sebagaimana dijelaskan dalam teori CMM, yakni mengatur cara pesan disampaikan agar sesuai dengan konteks sosial masyarakat yang sedang rentan. Pendekatan persuasif yang tidak menggurui adalah bentuk konkret “koordinasi tindakan dan makna” yang menempatkan dakwah sebagai ruang dialog, bukan instruksi satu arah. Hal ini memperkuat proses pembentukan makna bersama yang diperlukan untuk memulihkan hubungan antarwarga.

Proses rekonsiliasi yang dilakukan di Desa Tallung Ura menunjukkan adanya upaya membangun kembali keharmonisan sosial masyarakat pasca Pilkada melalui komunikasi yang terarah dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan teori Coordinated Management of Meaning (CMM) yang dikembangkan oleh W. Barnett Pearce dan Vernon E. Cronen, di mana makna sosial terbentuk melalui interaksi dan koordinasi antara individu dalam konteks tertentu. Komunikasi yang terkoordinasi memungkinkan terciptanya kesepahaman dan menghapus prasangka antarkelompok. Sehingga rekonsiliasi tidak hanya menjadi proses

penyelesaian konflik, tetapi juga menjadi sarana membangun sistem komunikasi sosial yang lebih bermakna dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Tallung Ura.

2. Tokoh Masyarakat sebagai Penengah Konflik

Selain tokoh agama, tokoh masyarakat juga memainkan peran penting, sebagaimana dijelaskan oleh Jasdar selaku tokoh masyarakat:

“Memang sudah seharusnya ada pihak ketiga yang berperan sebagai penengah dalam situasi memanas pasca Pilkada antara para pendukung o1 dan o2, yang telah menimbulkan kerenggangan di antara masyarakat. Apabila hubungan kedua pihak tidak segera didamaikan, maka pertikaian dikhawatirkan akan terus berlanjut. Oleh karena itu, baik tokoh agama maupun pemerintah desa perlu turun tangan dan berupaya mencari cara untuk memulihkan kembali hubungan masyarakat yang sempat renggang tersebut.”

Pernyataan informan tersebut mencerminkan pentingnya peran mediator dalam proses rekonsiliasi pasca kontestasi politik. Keberadaan pihak ketiga seperti tokoh agama, pemerintah desa dan tokoh masyarakat memiliki fungsi strategis sebagai komunikator perdamaian yang menjembatani pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini sejalan dengan konsep komunikasi mediatif, di mana proses penyampaian pesan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan partisipatif dalam membangun kembali kepercayaan social [20]. Kehadiran mediator lokal memungkinkan terjadinya proses negosiasi makna dan emosi secara lebih efektif karena kedekatan sosial dan kultural dengan masyarakat yang berselisih. Keterlibatan tokoh masyarakat dan pemerintah desa menjadi bentuk konkret dari upaya pengelolaan makna bersama yang diharapkan dapat menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat kohesi antarwarga pasca Pilkada.

Kutipan Jasdar menunjukkan bagaimana tokoh masyarakat memaknai dirinya sebagai “pihak ketiga” yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial. Dalam perspektif CMM maupun komunikasi mediatif, tindakan ini mencerminkan proses negosiasi makna, di mana mediator membantu kedua pihak yang berkonflik menyusun kembali pemahaman bersama terkait konflik serta bagaimana mereka seharusnya meresponsnya. Kedekatan sosial tokoh masyarakat dengan warga membuat proses koordinasi makna ini lebih efektif, karena mereka dianggap netral dan dipercaya semua pihak.

Tokoh masyarakat berperan sebagai jembatan sosial yang menjembatani pihak-pihak yang berkonflik dan membantu menciptakan stabilitas sosial. Dalam konteks rekonsiliasi pasca Pilkada, tokoh masyarakat memiliki posisi strategis karena kedekatan sosialnya dengan warga serta kapasitasnya dalam memahami dinamika lokal. Peran ini membuat mereka dipercaya sebagai pihak yang netral dan dapat diterima oleh semua kelompok yang berselisih.

3. Pemerintah Desa sebagai Fasilitator Rekonsiliasi

Peran pemerintah desa juga menjadi elemen penting dalam proses rekonsiliasi. Tamrin selaku PJ Kepala Desa Tallung Ura, menyatakan:

“Kami selaku PJ Kepala Desa Tallung Ura, juga melihat adanya kerenggangan yang dialami oleh masyarakat Desa Tallung Ura. Oleh karena itu, melalui adanya proses rekonsiliasi ini diharapkan dapat membantu meredakan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat pasca Pilkada. Dengan dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat, kami berupaya menjadi mediator yang membantu memulihkan kembali hubungan antarwarga tanpa membeda-bedakan atau bersikap berat sebelah.”

Upaya pemerintah desa yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat mencerminkan bentuk komunikasi kolaboratif dan partisipatif di mana proses rekonsiliasi tidak dilakukan secara sepahak, tetapi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep komunikasi rekonsiliatif, yang menekankan pentingnya peran aktor-aktor sosial dalam menciptakan suasana damai dan mengembalikan kepercayaan antarwarga.

Proses rekonsiliasi pasca Pilkada di Desa Tallung Ura Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa peran komunikator sangat signifikan dalam menenangkan suasana dan mengembalikan kepercayaan sosial. Para tokoh yang memiliki kredibilitas dan dihormati oleh masyarakat berperan aktif dalam menyampaikan pesan-pesan perdamaian, mengajak masyarakat untuk saling memaafkan dan menanamkan kembali nilai-nilai persaudaraan serta kebersamaan. Pendekatan yang dilakukan para komunikator umumnya bersifat persuasif, dengan menekankan pada aspek emosional dan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat.

Sikap kepala desa yang menegaskan pentingnya bersikap adil, tidak membeda-bedakan serta tidak berpihak pada kelompok tertentu menunjukkan penerapan etika komunikasi kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan persatuan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa proses rekonsiliasi pasca Pilkada tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan sosial yang membutuhkan empati, keterbukaan serta komitmen bersama untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Selain itu, Tamrin selaku PJ Kepala Desa juga menuturkan bahwa:

“Sebagai pihak pemerintah, kami berupaya melakukan pendekatan secara personal kepada warga dari kedua kubu yang berbeda pandangan. Pendekatan tersebut dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah warga, disertai dialog santai yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan hubungan sosial yang baik antar masyarakat. Selain itu, kami juga menjalin kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar langkah-langkah yang diambil sejalan dan terkoordinasi dengan baik. Melalui strategi komunikasi yang bersifat persuasif

dan kekeluargaan, masyarakat perlahan menunjukkan keterbukaan dan kembali menjalin interaksi sosial yang harmonis.”

Keberhasilan komunikator dalam memfasilitasi rekonsiliasi juga ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Komunikator yang efektif biasanya menggunakan bahasa yang santun, empatik dan mudah diterima oleh semua lapisan masyarakat. Mereka tidak hanya menyampaikan pesan verbal, tetapi juga menampilkan keteladanan dalam tindakan dan sikap, sehingga pesan rekonsiliasi yang disampaikan menjadi lebih kredibel dan berdampak positif. Peran komunikator dalam rekonsiliasi pasca Pilkada bukan hanya sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai penggerak sosial yang mampu menghidupkan kembali semangat persatuan di tengah perbedaan politik.

B. Mekanisme Komunikasi dalam Mengatasi Konflik Pasca Pilkada

Mekanisme komunikasi memegang peranan penting dalam upaya mengatasi konflik sosial yang muncul pasca pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Enrekang. Mekanisme ini mencakup pola, saluran dan pendekatan komunikasi yang digunakan oleh berbagai pihak untuk menciptakan pemahaman bersama dan memperbaiki hubungan antarwarga yang sempat terpecah akibat perbedaan pilihan politik. Komunikasi yang efektif menjadi sarana utama dalam membangun kembali rasa saling percaya dan menumbuhkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas sosial. Irianto, salah satu warga setempat, mengemukakan bahwa:

“Pasca kontestasi Pilkada, masyarakat khususnya di Dusun Mendeng mengalami dinamika sosial yang ditandai dengan meningkatnya ketegangan dan konflik antarwarga. Bahkan, hubungan antarkeluarga pun sempat mengalami disharmoni sebagai dampak dari perbedaan pilihan politik. Jadi menurut kami apabila tidak terdapat mekanisme atau strategi komunikasi yang diinisiasi oleh pemerintah desa, besar kemungkinan kondisi tersebut akan berlanjut kembali pada saat pemilihan berikutnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Tallung Ura, diperoleh gambaran mekanisme komunikasi yang memiliki peran penting dalam meredam dan mengatasi konflik sosial Pasca Pilkada.

1. Komunikasi Persuasif oleh Tokoh Agama

Tokoh agama memainkan peran penting dalam meredam ketegangan melalui pendekatan persuasif yang disampaikan dalam kegiatan keagamaan yang mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis. Ruslan selaku tokoh agama juga menegaskan bahwa:

“Kami selalu berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak memperpanjang masalah hanya karena perbedaan pilihan. Dalam setiap

kesempatan, baik di mimbar khutbah maupun kegiatan pengajian, kami menyampaikan pesan untuk menjaga ukhuwah dan saling menghormati satu sama lain.”



Figure 2. Sosialisasi Tokoh Agama

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama memanfaatkan ruang-ruang keagamaan sebagai media komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan damai dan menanamkan nilai-nilai kebersamaan. Tokoh agama memanfaatkan khutbah, pengajian, dan diskusi keagamaan sebagai media untuk memperkuat solidaritas sosial serta memulihkan hubungan yang retak. Melalui proses komunikasi keagamaan ini, terjadi pertukaran makna dan pembentukan pemahaman bersama di antara jamaah.

2. Komunikasi Sosial Partisipatif oleh Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat berperan sebagai penghubung sosial yang mendekatkan kembali warga yang berseberangan dan membantu memulihkan interaksi sosial yang terganggu akibat perbedaan politik. Salah satu tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa:

“Kami senantiasa berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak memperpanjang permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan pilihan politik. Dalam berbagai kesempatan, baik setelah melaksanakan salat berjamaah di masjid maupun pada kegiatan gotong royong, kami sering memanfaatkan

momen tersebut untuk berdiskusi mengenai upaya membangun kembali keharmonisan di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, kami juga menyampaikan pesan-pesan moral tentang pentingnya menjaga persaudaraan, memperkuat solidaritas sosial serta saling menghormati antarwarga.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memiliki peran sentral dalam memelihara dan memulihkan keharmonisan sosial pasca kontestasi politik. Keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti:

- a. Pemanfaatan forum informal seperti gotong royong dan obrolan setelah salat berjamaah.
- b. Penyampaian pesan moral tentang pentingnya persaudaraan dan solidaritas sosial.
- c. Dorongan agar warga tidak memperpanjang konflik politik.

Pendekatan ini mencerminkan bentuk komunikasi sosial yang persuasif dan partisipatif, di mana tokoh masyarakat menggunakan kedekatan emosional dan sosialnya untuk menyampaikan pesan perdamaian, memperkuat solidaritas serta menumbuhkan rasa saling menghormati di antara warga. Upaya tersebut menjadi mekanisme efektif dalam membangun kembali jembatan komunikasi yang sempat terputus selama proses politik berlangsung. Tokoh masyarakat berperan sebagai mediator sosial yang mampu menginisiasi rekonsiliasi dan menjaga stabilitas sosial di tingkat komunitas.

Namun, terdapat pandangan dari sebagian pihak yang menilai bahwa proses komunikasi yang dilaksanakan belum terimplementasi secara merata pada seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih ada kelompok tertentu yang menunjukkan keengganan untuk berpartisipasi secara aktif dalam dialog terbuka, akibat munculnya rasa kekecewaan dan menurunnya tingkat kepercayaan pasca penyelenggaraan Pilkada.

“Proses dialog yang dilakukan pasca Pilkada belum sepenuhnya mampu memulihkan hubungan sosial antarwarga secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan oleh masih adanya pihak-pihak tertentu yang berperan sebagai provokator dengan menyebarkan hasutan agar masyarakat enggan terlibat dalam proses rekonsiliasi. Menurut informan tersebut, sebagian masyarakat beranggapan bahwa rekonsiliasi tidak diperlukan karena merasa hubungan sosial sudah berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat yang memiliki cara pandang sempit dan resistif terhadap upaya penyatuan kembali pasca kontestasi politik.”

Pernyataan informan tersebut menggambarkan adanya perbedaan persepsi dan makna dalam proses komunikasi pasca Pilkada, yang sejalan dengan prinsip Teori Coordinated Management of Meaning (CMM).

Menurut Pearce dan Cronen, teori CMM menekankan bahwa makna tidak hanya terdapat pada pesan yang disampaikan, tetapi juga pada konteks sosial dan interaksi antarindividu yang membentuk realitas bersama. Perbedaan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya rekonsiliasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian makna (misalignment of meaning) antara pihak fasilitator rekonsiliasi dan sebagian warga.

3. Komunikasi Terbuka dan Fasilitatif oleh Pemerintah Desa

Pemerintah desa sebagai fasilitator utama dalam komunikasi antarkelompok. Keberadaan mereka penting dalam menciptakan ruang dialog yang aman, inklusif, dan kondusif bagi penyelesaian masalah secara musyawarah. Mustakim menambahkan bahwa keberhasilan rekonsiliasi sangat bergantung pada sikap keterbukaan dan kejujuran dalam berkomunikasi, menurutnya:

“Apabila tidak ada komunikasi yang jujur dan terbuka, maka akan sulit untuk menyatukan pandangan. Kami berupaya agar setiap pihak dapat menyampaikan pendapatnya tanpa saling menyalahkan. Pertemuan antara kedua belah pihak ini diadakan dengan harapan dapat menemukan jalan keluar agar konflik tidak berkepanjangan. Sebagaimana kita ketahui, hasil dialog yang bersifat praktis dan konstruktif tidak muncul secara spontan, melainkan sengaja diciptakan melalui proses komunikasi. Ketika komunikasi dapat berjalan dengan lancar, maka hasil yang diperoleh pun akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran sentral dalam menciptakan komunikasi terbuka dan fasilitatif sebagai mekanisme utama dalam meredam konflik pasca Pilkada di Desa Tallung Ura. Pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memediasi dialog, tetapi juga sebagai penyedia ruang komunikasi yang aman, inklusif, dan terbuka bagi seluruh warga. Melalui berbagai forum resmi seperti musyawarah desa, pertemuan lintas kelompok, serta diskusi informal yang difasilitasi oleh aparat desa, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, keluhan, maupun usulan tanpa tekanan dan tanpa mengkhawatirkan adanya dominasi kelompok tertentu. Selain itu, Ruslan turut menambahkan bahwa.

“Keberhasilan proses rekonsiliasi pasca Pilkada sangat ditentukan oleh kesiapan setiap pihak untuk bersikap terbuka dan menjalin komunikasi secara jujur. Tanpa adanya komunikasi yang transparan dan dilandasi sikap saling menghargai, upaya penyatuan masyarakat akan sulit untuk diwujudkan. Pendekatan yang dilakukan oleh tokoh agama dan pemerintah desa dinilai cukup efektif karena menekankan nilai-nilai kekeluargaan serta semangat gotong royong sebagai dasar dalam membangun kembali keharmonisan sosial. Namun demikian, proses rekonsiliasi tetap memerlukan konsistensi dan pendampingan berkelanjutan agar hubungan

sosial yang telah pulih tidak kembali mengalami ketegangan akibat perbedaan pandangan politik di masa mendatang.”

Mekanisme komunikasi yang diterapkan di Desa Tallung Ura Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa keberhasilan rekonsiliasi sangat bergantung pada keterbukaan, partisipasi dan konsistensi komunikasi antar aktor sosial. Komunikasi yang dialogis, empatik dan berbasis nilai keagamaan menjadi kunci utama dalam meredam ketegangan politik serta memperkuat kembali hubungan sosial masyarakat. Sehingga, mekanisme komunikasi yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampai pesan tetapi juga sebagai medium yang mempertemukan perbedaan dan membangun kembali kohesi sosial pasca kontestasi politik.

4. Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Rekonsiliasi

Mekanisme komunikasi yang berperan dalam mengatasi konflik pasca Pilkada juga dapat diwujudkan melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran pesan-pesan rekonsiliatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Ruslan selaku tokoh agama, yang menjelaskan bahwa:

“Media sosial memiliki fungsi strategis dalam memperluas jangkauan komunikasi serta mempercepat proses penyampaian pesan-pesan perdamaian kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan media sosial menjadi sarana penting dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan ibu rumah tangga, yang juga terdampak oleh dinamika konflik pasca Pilkada. Perselisihan tidak hanya terjadi di antara kaum laki-laki, tetapi juga merambah ke ruang interaksi sosial perempuan. Oleh karena itu, melalui platform seperti grup WhatsApp, kami berupaya membangun ruang komunikasi yang lebih konstruktif dengan menyuarakan pesan-pesan perdamaian, menghindari perdebatan yang memicu ketegangan dan menekankan pentingnya memperbaiki serta memelihara hubungan sosial yang harmonis.”

Pemanfaatan media sosial dalam proses rekonsiliasi pasca Pilkada di Kabupaten Enrekang Desa Tallung Ura menunjukkan adanya transformasi mekanisme komunikasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Media sosial berfungsi sebagai sarana strategis dalam memperluas jangkauan komunikasi, menyebarkan pesan perdamaian serta memperkuat hubungan sosial masyarakat yang sempat terpecah akibat perbedaan pilihan politik.



Figure 3. Grup WhatsApp Desa Tallug Ura

Media sosial memiliki peran signifikan dalam memperkuat mekanisme komunikasi pasca Pilkada di Desa Tallung Ura.

- Menyebarluaskan pesan-pesan positif dan edukatif.
- Meluruskan informasi yang berpotensi menimbulkan konflik.
- Membangun ruang komunikasi digital yang lebih kondusif.
- Mengawasi potensi provokasi melalui grup WhatsApp desa.

Namun hambatan komunikasi muncul ketika sebagian pihak gagal memahami tujuan dialog sebagai sarana membangun kembali kepercayaan sosial, bukan sekadar formalitas politik. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih partisipatif dan kontekstual agar pesan rekonsiliasi dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Menciptakan koordinasi makna yang selaras sebagaimana ditekankan dalam teori CMM, proses rekonsiliasi dapat berjalan lebih efektif dalam membangun kembali harmoni sosial di Desa Tallung Ura pasca Pilkada.

“Sebagai tokoh masyarakat, saya memahami bahwa dalam proses komunikasi khususnya di tingkat desa, sering kali terjadi kesalahpahaman terhadap makna pesan yang disampaikan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi pesan. Apabila makna yang diterima sesuai dengan maksud yang disampaikan, maka proses komunikasi dalam

rekonsiliasi dapat dikatakan berjalan efektif dan pesan tersebut tersampaikan dengan benar kepada masyarakat setempat.”

Hal ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi digital yang lebih terarah dan berbasis literasi media. Pemanfaatan media sosial dalam proses rekonsiliasi pasca Pilkada di Desa Tallung Ura mencerminkan perubahan pola komunikasi yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Media sosial tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga ruang pembentukan makna sosial yang memengaruhi hubungan antarwarga. Dalam hal ini, teori Coordinated Management of Meaning (CMM) memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana makna-makna tersebut dikonstruksi, dinegosiasikan dan diselaraskan dalam interaksi daring.

Mekanisme komunikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai media untuk menumbuhkan empati, memperkuat rasa saling percaya serta menyamakan persepsi antarwarga yang sempat terpecah akibat perbedaan pilihan politik. Keberhasilan rekonsiliasi sosial di tingkat desa sangat bergantung pada sejauh mana mekanisme komunikasi dijalankan secara partisipatif, terbuka dan berorientasi pada pemahaman bersama.

C. Strategi Komunikasi dalam Proses Rekonsiliasi Pasca Pilkada

Strategi komunikasi dalam proses rekonsiliasi pasca Pilkada di Kabupaten Enrekang merupakan serangkaian langkah yang dirancang untuk menciptakan komunikasi yang efektif, membangun kembali kepercayaan publik dan memperkuat hubungan sosial yang sempat renggang akibat perbedaan pilihan politik. Strategi ini dilakukan secara terencana oleh berbagai aktor sosial baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakat setempat dengan memperhatikan konteks budaya dan nilai-nilai keislaman yang hidup di tengah masyarakat Desa Tallung Ura. Sebagaimana dikemukakan oleh Ekawati bahwa:

“Kami hanyalah masyarakat biasa yang tidak memiliki otoritas formal dalam mengambil keputusan atau memengaruhi opini publik secara luas. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan adanya strategi komunikasi yang efektif dan terarah untuk memulihkan kembali hubungan sosial yang sempat terganggu akibat dinamika politik pasca Pilkada. Peran pemerintah desa dan tokoh agama menjadi sangat penting, mengingat keduanya memiliki legitimasi sosial dan otoritas moral yang lebih kuat di mata masyarakat. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam membangun dialog yang konstruktif, menumbuhkan kembali kepercayaan antarwarga, serta memperkuat solidaritas sosial yang sempat melemah akibat perbedaan pilihan politik.”

Masyarakat menyadari keterbatasan mereka dalam memengaruhi opini publik dan mengambil keputusan, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang sistematis agar pesan rekonsiliasi dan pemulihan

hubungan sosial dapat tersampaikan dengan jelas dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat strategi utama yang digunakan dalam proses rekonsiliasi pasca Pilkada, yaitu:

1. Strategi Komunikasi Berbasis Nilai Keagamaan yang Humanis dan Kontekstual

Salah satu strategi yang dominan digunakan adalah strategi komunikasi berbasis nilai keagamaan yang humanis dan kontekstual agar meninggalkan konflik dan kembali pada nilai-nilai kebersamaan [21]. Para komunikator menggunakan pesan-pesan yang menekankan pentingnya ukhuwah (persaudaraan), gotong royong dan toleransi sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini terbukti efektif karena selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial yang sudah mengakar dalam masyarakat. Pesan yang disampaikan tidak bersifat menggurui, tetapi lebih mengajak dan menyentuh sisi emosional sehingga mudah diterima oleh berbagai kalangan.

Tokoh agama, pemerintah desa dan tokoh masyarakat menerapkan berbagai strategi komunikasi yang bersifat humanis dan kontekstual berbasis nilai keagamaan untuk menciptakan suasana damai dan harmonis di tengah masyarakat. Rahman selaku tokoh agama mengemukakan bahwa strategi yang diterapkan dalam kegiatan dakwah dan pemberian arahan kepada masyarakat berfokus pada pendekatan yang bersifat persuasif dan humanis. Pendekatan ini dipandang lebih efektif dalam membangun kesadaran kolektif, menumbuhkan empati sosial serta memperkuat komitmen masyarakat untuk menjaga keharmonisan pasca kontestasi politik.

“Kami tidak menyinggung secara langsung perbedaan pilihan politik, melainkan mengajak masyarakat untuk saling memaafkan dan kembali bersatu. Pesan-pesan yang kami sampaikan selalu dikaitkan dengan ajaran agama agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dalam menyampaikan pesan tersebut, kami juga mempertimbangkan situasi dan kondisi, agar dapat menentukan materi yang tepat untuk disampaikan serta menghindari informasi yang bersifat sensitif bagi masyarakat.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tokoh agama menerapkan strategi komunikasi persuasif, humanis dan kontekstual dalam upaya menciptakan suasana damai pasca Pilkada di Desa Tallung Ura. Tokoh agama berperan penting sebagai komunikator yang menyampaikan pesan perdamaian melalui pendekatan keagamaan dengan mengaitkan ajaran Islam tentang ukhuwah, saling memaafkan dan menjaga persaudaraan. Strategi ini menunjukkan bahwa komunikasi dakwah tidak dilakukan secara frontal, tetapi dengan mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis masyarakat agar pesan dapat diterima tanpa menimbulkan resistensi.

Strategi tersebut selaras dengan prinsip Coordinated Management of Meaning (CMM) oleh Pearce dan Cronen, yang menjelaskan bahwa makna sosial dibangun secara bersama melalui koordinasi

antarindividu dalam komunikasi. Dalam hal ini, tokoh agama berperan sebagai pengelola makna yang membantu masyarakat mengonstruksi pemahaman baru tentang pentingnya perdamaian dan kebersamaan, menggantikan makna lama yang sarat dengan perbedaan politik. Ruslan selaku tokoh agama menambahkan bahwa:

“Dalam proses rekonsiliasi ini, kami tidak hanya berfokus pada upaya menjalin komunikasi dengan kedua belah pihak yang terlibat, tetapi juga berusaha memastikan bahwa makna dari pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan tepat. Hal ini penting karena dalam setiap proses komunikasi, makna yang diutarakan sering kali tidak sepenuhnya tersampaikan, bahkan berpotensi disalahartikan oleh penerima pesan. Oleh karena itu, melalui proses rekonsiliasi ini diharapkan terbangun kesamaan makna dan pemahaman antarwarga, sehingga hubungan sosial yang sempat renggang dapat kembali terjalin dengan erat dan harmonis.”

Hasil wawancara di aats menekankan bahwa rekonsiliasi tidak hanya sekadar menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat konflik, tetapi juga memastikan bahwa pesan yang disampaikan dipahami dengan benar oleh penerima. Hal ini penting karena dalam setiap proses komunikasi, makna pesan sering kali tidak sepenuhnya tersampaikan atau bahkan dapat disalahartikan. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang diterapkan harus mampu menumbuhkan pemahaman bersama, sehingga seluruh warga dapat menangkap maksud dan tujuan rekonsiliasi secara seragam.

2. Strategi Komunikasi Partisipatif dan Terbuka oleh Pemerintah Desa

Selain itu, diterapkan strategi komunikasi partisipatif di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses dialog, musyawarah dan kegiatan sosial. Pendekatan partisipatif ini memungkinkan setiap pihak merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan sosial. Adapun bentuk implementasi dari strategi komunikasi partisipatif dan terbuka pemerintah desa sebagai berikut:

- a. Musyawarah desa yang menghadirkan seluruh elemen masyarakat
- b. Pertemuan lintas kelompok untuk menyatukan pandangan antarpendukung kandidat
- c. Dialog terbuka yang memberi kesempatan kepada masyarakat mengemukakan unek-uneknya
- d. Forum penyelesaian konflik yang digagas bersama aparat desa dan tokoh adat
- e. Pendampingan sosial bagi warga yang masih memiliki ketegangan hubungan.

Melalui kegiatan seperti gotong royong, forum diskusi desa masyarakat dapat mengekspresikan pandangan mereka, membangun empati dan menemukan titik temu di tengah perbedaan politik. Tamrin selaku PJ Kepala Desa Tallung Ura, menyampaikan bahwa:

“Kami selalu berusaha melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian konflik. Dalam setiap kegiatan, kami menghadirkan tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa dan perwakilan dari berbagai kelompok agar semua merasa dilibatkan dan tidak ada yang diabaikan.”

Strategi komunikasi yang dibangun bersifat terbuka, fasilitatif dan koordinatif dalam setiap kegiatan sehingga memberikan ruang bagi setiap warga untuk menyampaikan aspirasi dan menemukan solusi bersama. Menurutnya, strategi tersebut dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, sekaligus memastikan adanya keselarasan antara pihak pemerintah desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membangun kembali hubungan sosial yang harmonis.

Strategi tersebut menggambarkan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah desa bersifat terbuka dan menekankan pada kerja sama kolektif. Memberikan ruang partisipasi yang sama kepada seluruh elemen masyarakat, proses rekonsiliasi dapat berjalan dengan lebih efektif karena setiap pihak merasa memiliki tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan sosial.

3. Strategi Komunikasi Kultural Berbasis Kearifan Lokal

Strategi berikutnya adalah strategi komunikasi kultural, yang memanfaatkan kearifan lokal sebagai media penyampaian pesan. Di Desa Tallung Ura, nilai-nilai budaya seperti sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi (saling menghargai, saling mengingatkan dan saling memuliakan) dijadikan landasan moral dalam setiap kegiatan komunikasi. Nilai-nilai ini mampu menghidupkan kembali semangat solidaritas dan memperkuat rekonsiliasi karena berakar pada identitas sosial masyarakat setempat. Sebagaimana disampaikan oleh tokoh adat bahwa:

“Sebagai tokoh adat, kami selalu mengingatkan masyarakat agar kembali kepada nilai-nilai budaya kita sendiri seperti sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi. Nilai-nilai ini bukan hanya slogan tapi pedoman hidup yang mengajarkan kita untuk saling menghargai, saling menasihati dan saling memuliakan sesama. Dalam situasi pasca Pilkada kami memanfaatkan kegiatan adat seperti pertemuan kampung dan acara gotong royong untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Kami tidak membahas politik secara langsung, melainkan mengajak masyarakat untuk kembali pada semangat kebersamaan sebagai satu komunitas. Melalui cara ini, perlahaan-lahan suasana yang sempat tegang mulai mencair dan masyarakat bisa kembali berbaur tanpa ada rasa canggung atau perpecahan.”

Wawancara dengan tokoh adat tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi kultural memiliki peran penting dalam proses rekonsiliasi pasca Pilkada di Desa Tallung Ura. Pemanfaatan nilai-nilai lokal seperti sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi menjadi fondasi moral dalam membangun komunikasi yang harmonis serta inklusif di tengah masyarakat yang sempat terpecah akibat perbedaan pilihan politik. Melalui

pendekatan budaya, pesan-pesan damai disampaikan dengan cara yang lebih mudah diterima karena berakar pada identitas sosial dan sistem nilai yang sudah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat. Strategi ini sejalan dengan prinsip Coordinated Management of Meaning (CMM), yang menekankan pentingnya konteks dan makna bersama dalam menciptakan realitas sosial melalui komunikasi. Komunikasi berbasis kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat solidaritas, menumbuhkan empati dan membangun kembali kohesi sosial di masyarakat pasca Pilkada.

4. Strategi Komunikasi Empatik oleh Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat juga menerapkan strategi komunikasi empatik dengan memberikan ruang bagi pihak yang berkonflik untuk menyampaikan keluhan, menjelaskan perasaan dan membangun pemahaman bersama tanpa intervensi yang menghakimi. Sebagaimana dijelaskan oleh Jasdar selaku tokoh masyarakat bahwa:

“Kami tidak langsung menyalahkan atau memaksa mereka untuk berdamai. Kami berusaha mendengarkan terlebih dahulu apa yang mereka rasakan, baru setelah itu mencari titik temu bersama.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi empatik menjadi hal yang penting dalam proses rekonsiliasi karena membuka ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan perasaan dan pendapat tanpa rasa takut. Penerapan pendekatan empatik dilakukan dengan cara:

- a. Mendengarkan keluhan warga tanpa menghakimi
- b. Memberikan ruang emosional bagi warga untuk bercerita
- c. Membangun rasa aman sebelum mencari solusi
- d. Merangkul kelompok yang enggan berdialog
- e. Menjembatani warga yang hubungan sosialnya renggang

Melalui komunikasi yang empatik, para mediator dapat membangun kepercayaan serta menciptakan komunikasi yang menenangkan dan konstruktif. Salah satu masyarakat juga memberikan tanggapan terkait strategi yang diterapkan oleh beberapa tokoh di Desa Tallung Ura pasca Pilkada menyatakan bahwa:

“Kami merasa strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh tokoh agama dianggap paling berpengaruh oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam setiap penyampaiannya, tokoh agama selalu mengaitkan pesan-pesan dengan nilai-nilai keagamaan sehingga mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Bagi kalangan ibu rumah tangga seperti kami pendekatan ini dinilai efektif, mengingat

sebagian dari mereka sempat terlibat dalam percakapan yang menyinggung perbedaan pilihan politik di media sosial pasca Pilkada. Tidak hanya di kalangan laki-laki, tetapi juga di kalangan perempuan, hubungan sosial sempat mengalami kerenggangan akibat perbedaan pandangan politik. Namun, setelah diadakannya proses rekonsiliasi oleh berbagai pihak, hubungan yang sebelumnya renggang perlahan membaik dan suasana sosial di masyarakat kembali harmonis.”

Keberhasilan rekonsiliasi pasca Pilkada di Desa Tallung Ura tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh cara penyampaiannya, konteks sosial budaya serta keterlibatan semua pihak dalam proses komunikasi. Komunikasi yang bersifat persuasif, partisipatif dan kultural terbukti mampu menciptakan suasana yang kondusif, mengurangi ketegangan politik serta memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat. Komunikasi berperan tidak hanya sebagai alat penyampaian informasi tetapi juga sebagai sarana pemulihan sosial dan pembentukan kembali harmoni pasca kontestasi politik. Hal paling penting dalam analisis percakapan adalah cara komunikator menciptakan stabilitas dan membangun organisasi percakapan antar kedua pihak.

Proses rekonsiliasi pasca Pilkada di Desa Tallung Ura menunjukkan bahwa komunikasi berperan penting sebagai sarana pemulihan sosial, pembangunan kembali keharmonisan dan pengelolaan makna antarwarga. Berdasarkan peran komunikator Pasca Pilkada meliputi tokoh agama, pemerintah desa dan tokoh masyarakat menjadi faktor sentral dalam menenangkan konflik, menumbuhkan kesadaran kolektif akan ukhuwah Islamiyah serta mengajak masyarakat untuk saling memaafkan dan menjaga persatuan. Tokoh agama misalnya melalui mimbar khutbah, pengajian dan kunjungan rumah secara persuasif mengingatkan warga agar tidak memperpanjang perbedaan politik dan menekankan pentingnya persaudaraan. Pendekatan ini selaras dengan QS. Al-Hujurat ayat 10 yang menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah bersaudara dan wajib menegakkan keadilan serta menghindari permusuhan, sehingga setiap tindakan komunikasi bertujuan memulihkan kepercayaan, memperkuat solidaritas dan membangun rasa aman di tengah masyarakat.

Mekanisme komunikasi persuasif, partisipatif, terbuka dan kultural diterapkan untuk membangun kesamaan makna, memperbaiki hubungan sosial yang renggang dan mencegah penyalahpahaman antarwarga. Hal ini tercermin melalui forum musyawarah desa, gotong royong, pengajian serta pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan pesan perdamaian, yang sejalan dengan QS. Al-Hujurat ayat 9 yang menekankan perlunya mengadakan perdamaian antara pihak yang berselisih. Tokoh masyarakat berperan sebagai mediator sosial dengan memanfaatkan kedekatan emosional dan kulturalnya untuk membangun komunikasi partisipatif, mendengarkan keluhan warga, serta memfasilitasi dialog konstruktif antarwarga dari kubu yang berbeda. Pemerintah desa turut mendukung mekanisme komunikasi ini melalui pendekatan terbuka, inklusif dan koordinatif, sehingga setiap warga dapat menyampaikan aspirasi tanpa takut dihakimi atau didominasi kelompok tertentu.

Strategi komunikasi yang diterapkan yakni strategi persuasif berbasis nilai keagamaan, partisipatif, kultural dan empatik. Strategi ini menekankan pemulihan solidaritas sosial, penumbuhan empati dan keberlanjutan rekonsiliasi melalui pendekatan yang kontekstual terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Pemanfaatan kearifan lokal seperti nilai sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi menjadi landasan moral dalam setiap interaksi, mengajarkan saling menghargai, menasihati dan memuliakan sesama, sehingga pesan perdamaian lebih mudah diterima. Selain itu, komunikasi berbasis dakwah yang dilakukan tokoh agama menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah, saling memaafkan dan menjaga persaudaraan, sehingga konflik politik tidak merusak ikatan sosial jangka panjang. Strategi komunikasi ini memperkuat kesamaan makna di antara warga, mengurangi kesalahpahaman dan menumbuhkan kesadaran bersama bahwa perbedaan politik adalah hal wajar dalam demokrasi.

Seluruh upaya komunikasi tersebut dapat dianalisis melalui kerangka Coordinated Management of Meaning (CMM) oleh W. Barnett Pearce dan Vernon Cronen, yang menekankan bahwa makna sosial dibangun secara bersama melalui interaksi dan koordinasi antarindividu. Komunikator berperan sebagai pengelola makna (meaning management) yang memastikan pesan perdamaian, nilai keagamaan dan kearifan lokal tersampaikan dengan tepat, dipahami secara seragam dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Sehingga proses rekonsiliasi tidak hanya bersifat penyelesaian konflik, tetapi juga membangun kembali kohesi sosial, memperkuat solidaritas dan menciptakan masyarakat yang harmonis, adil serta bersatu, sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 9–10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang persuasif, partisipatif, kultural dan empatik merupakan fondasi utama bagi terciptanya rekonsiliasi sosial yang efektif dan berkelanjutan di Desa Tallung Ura.

Keberhasilan proses rekonsiliasi pasca Pilkada di Desa Tallung Ura Kabupaten Enrekang tidak terlepas dari kemampuan para komunikator dalam menciptakan koordinasi makna dan tindakan komunikasi yang selaras. Pendekatan berbasis agama dan budaya menjadi faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan, solidaritas dan harmoni sosial. Melalui komunikasi yang bermakna, berkeadilan dan berlandaskan nilai spiritual, masyarakat dapat kembali bersatu sebagai satu kesatuan yang damai dan saling menghargai.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Komunikasi dan Rekonsiliasi Pasca Pilkada di Kabupaten Enrekang, dapat disimpulkan bahwa proses rekonsiliasi sosial yang terjadi di Desa Tallung Ura berjalan melalui komunikasi yang kolaboratif, partisipatif dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan serta kearifan lokal.

1. Peran komunikator baik tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pemerintah desa, sangat strategis dalam memfasilitasi rekonsiliasi pasca Pilkada. Tokoh agama berfungsi sebagai mediator melalui komunikasi dakwah yang persuasif dan partisipatif, sementara tokoh masyarakat dan

pemerintah desa menjadi fasilitator yang menciptakan komunikasi inklusif, adil dan terkoordinasi.

2. Mekanisme komunikasi memegang peran penting dalam meredam konflik pasca Pilkada. Tokoh agama menyampaikan pesan damai secara persuasif, tokoh masyarakat memanfaatkan forum sosial dan gotong royong serta pemerintah desa menciptakan ruang dialog terbuka dan inklusif. Pemanfaatan media sosial juga memperluas jangkauan pesan dan memperkuat kohesi sosial.
3. Strategi komunikasi meliputi pendekatan persuasif berbasis nilai keagamaan, partisipatif, kultural dan empatik. Persuasif menekankan ukhuwah dan toleransi, partisipatif melibatkan seluruh elemen masyarakat, sementara strategi kultural memanfaatkan nilai lokal seperti sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi untuk memperkuat solidaritas.

Temuan ini memberikan implikasi bahwa keberhasilan rekonsiliasi politik sangat bergantung pada penguatan kapasitas komunikasi para mediator lokal serta pengembangan model komunikasi rekonsilatif yang mengintegrasikan nilai agama, budaya, dan partisipasi warga. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa rekonsiliasi efektif ketika komunikasi dikelola sebagai proses dialogis yang berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat terhadap konflik.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan arahannya selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada tokoh agama, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat di Desa Tallung Ura yang telah memberikan dukungan dan informasi selama penelitian berlangsung. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan kajian komunikasi dan rekonsiliasi sosial.

Referensi

- [1] A. Sampurna, et al., Book Chapter Komunikasi Politik Islam. Malang: Ahlimedia Press, 2020.
- [2] S. Aminah, Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal. Jakarta: Kencana, 2014.
- [3] E. Siswanto, “Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015,” Politico, vol. 17, no. 2, 2017.
- [4] Hertanto, et al., “Problems and Challenges of Suku Anak Dalam in the 2019 General Election: A Policy Recommendation,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 29, no. 1, 2025.
- [5] G. Heryanto, Problematika Komunikasi Politik: Bingkai Politik Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: IRCCiSoD, 2018.
- [6] L. Trijono, Konflik dan Rekonsiliasi: Sebuah Pendekatan Transformatif. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

- [7] I. Hajar, Teori dan Praktek Komunikasi Politik. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- [8] D. Nimmo, Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- [9] M. Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- [10] M. Amin, Komunikasi Dakwah dan Resolusi Konflik Sosial. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- [11] L. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- [12] R. K. Yin, Case Study Research and Applications: Design and Methods, Terj. Iswadi et al., Studi Kasus Desain & Metode. Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2020.
- [13] A. Khilmiyah, Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Samudra Biru, 2016.
- [14] H. Nawawi and M. Martini, Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- [15] A. M. Saeful and M. A. Djaliel, Metode Penelitian Dakwah. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- [16] A. Kadir, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif. Makassar: Indobis Media Center, 2003.
- [17] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [18] M. B. Miles and A. M. Huberman, Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994.
- [19] R. Rahayu and S. R. Rindrayani, "Menguji Keabsahan Data Penelitian Kualitatif," Jurnal Ilmu Pendidikan, vol. 3, no. 2, 2025.
- [20] I. Y. Tjiptosowarno, et al., Pengantar Ilmu Komunikasi. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- [21] O. E. Uchjana, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.